

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris dengan berbagai komoditas pertanian yang merupakan basis utama perekonomian nasional. Artinya, sektor pertanian merupakan sektor utama yang menyumbang hampir setengah dari perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan sektor pertanian merupakan sektor penggerak perkembangan ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja pada sektor pertanian serta produk nasional yang bersal dari pertanian, artinya pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional (Mubyarto, 1986).

Sektor pertanian terdiri dari beberapa subsektor, yaitu tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan serta jasa pertanian dan perburuan. Salah satu subsektor pertanian yang memberikan kontribusi pada perekonomian adalah subsektor perkebunan, komoditas subsektor perkebunan yang menjadi unggulan negara dalam menghasilkan devisa adalah tanaman kelapa sawit. Pada tahun 2018, luas lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia sebesar 14,03 juta ha dengan produksi mencapai 42,9 juta ton yang terdiri dari Perkebunan Besar Negara (PBN), Perkebunan Rakyat (RA), dan Perkebunan Besar Swasta (PBS) (Direktorat Jendral Perkebunan Indonesia, 2018).

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang sangat diperhatikan di Indonesia karena memiliki nilai ekonomi. Tanaman ini menjadi sumber utama minyak nabati yang digunakan untuk produk makanan, minyak industri, serta bahan bakar nabati (biodiesel). Beragamnya produk turunan dari

minyak kelapa sawit menjadikan tanaman ini sangat penting bagi pembangunan sektor perkebunan nasional, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kelapa sawit juga memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan ekspor Indonesia sebagai sumber devisa negara. Pengembangan kelapa sawit dapat mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi lainnya yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Provinsi Jambi adalah salah satu daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia, dengan kelapa sawit menjadi salah satu komoditas unggulan dalam sektor perkebunannya. Pengembangan kelapa sawit di Jambi memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah dan berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk mengeluarkan berbagai kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk mendukung pengembangan kelapa sawit secara optimal. Sektor perkebunan sendiri mengalami perkembangan luas tanaman perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas Areal Tanaman, Produksi dan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Jambi Tahun 2018 - 2022

Tahun	Luas Areal (Ha)				Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
	TBM	TM	TTM	Jumlah		
2018	108.046	376.374	22.042	506.462	1.142.078	3,034
2019	101.770	323.846	96.594	522.210	1.038.292	3,206
2020	108.009	318.790	99.949	526.748	983.497	3,085
2021	114.137	413.062	103.132	630.332	1.183.545	2,865
2022	116.504	418.977	102.466	637.947	1.246.078	2,974

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2023

Tabel 1 menunjukkan bahwa perkembangan luas areal perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Dari

segi produksi pada tahun 2019 produksi kelapa sawit mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 103.786 Ton. Sedangkan produktivitas kelapa sawit mengalami fluktuasi dari kurun waktu tahun 2018 sampai tahun 2022. Hal ini disebabkan semakin tingginya luas areal tanaman tidak menghasilkan (TTM) khususnya pada tahun 2020 sebesar 99.949 Ha sehingga tidak dapat memberikan hasil yang optimal terhadap produksi kelapa sawit.

Perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi tersebar di sembilan kabupaten yaitu Kabupaten Batanghari, Muaro Jambi, Bungo, Tebo, Merangin, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Kerinci. Data mengenai luas areal tanaman, produksi dan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat di Provinsi Jambi menurut kabupaten dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Luas Areal, Produksi dan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Provinsi Jambi Menurut Kabupaten Tahun 2022

Kabupaten	Luas Areal (Ha)			Jumlah (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
	TBM	TM	TTM			
Batang Hari	12.159	93.090	6.494	111.743	318.562	3,422
Muaro Jambi	16.572	90.044	30.066	136.682	233.551	2,593
Bungo	26.156	30.119	14.920	71.195	106.646	3,540
Tebo	15.305	42.511	10.795	68.611	119.539	2,811
Merangin	11.700	34.960	22.895	69.555	145.982	4,175
Sarolangun	11.824	38.392	4.199	54.415	99.750	2,598
Tanjung Jabung Barat	22.702	58.276	6.786	51.591	54.081	928
Tanjung Jabung Timur	46	31.541	6.312	37.899	76.378	2,421
Kerinci	40	44	-	84	32	727
Jumlah	116.504	418.977	102.466	637.947	1.246.078	2,974

Sumber: Dinas Perkebebanan Provinsi Jambi 2023

Tabel 2 menunjukkan bahwa Kabupaten Muaro Jambi merupakan kabupaten yang memiliki luas areal perkebunan terbesar di Provinsi Jambi pada tahun 2022 dengan luas 136.682 Ha atau sebesar 21,4 % dari total luas areal perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi. Untuk produksi sebesar 233.551 Ton atau sebesar 18,7 % sedangkan produktivitas sebesar 2,593 Kg/ha. Produksi dan produktivitas kelapa sawit di Kabupaten Muaro Jambi masih tergolong rendah dibandingkan produksi dan produktivitas kelapa sawit yang ada di kabupaten di Provinsi Jambi. Hal ini karena Kabupaten Muaro Jambi memiliki luasan areal Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM) yaitu sebesar 30.666 Ha, sehingga produksi kelapa sawit mengalami penurunan yang signifikan. Keterlambatan peremajaan menjadi salah satu faktor rendahnya produktivitas kelapa sawit sehingga perlu segera dilakukannya peremajaan kelapa sawit.

Pengusahaan kebun kelapa sawit memiliki usia produktif dan ekonomis antara 4-25 tahun. Setelah tanaman kelapa sawit melebihi usia tersebut, artinya tanaman kelapa sawit perlu diremajakan. Peremajaan (*Replanting*) dilakukan agar hasil produksi kelapa sawit tidak menurun. Pada tahap ini diperlukan perencanaan yang matang dan terperinci untuk menghindari terjadinya kerugian selama masa peremajaan. Berikut luas areal tanaman perkebunan kelapa sawit rakyat di kabupaten Muaro Jambi menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Luas Areal Tanaman Belum menghasilkan (TBM), Tanaman Menghasilkan (TM), Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM) dan Total Luas Areal Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Kabupaten Muaro Jambi Menurut Kecamatan Tahun 2022

Kabupaten	Luas Areal (Ha)			Jumlah (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
	TBM	TM	TTM			
Jambi Luar Kota	683	4.363	5.660	10.706	16.360	3,750
Sekernan	3.572	21.798	2.146	27.516	58.010	2,661
Kumpeh Ilir	1.204	13.501	372	15.077	27.763	2,056
Muaro Sebo	3.509	6.301	-	9.810	15.235	2,418
Taman Rajo	875	379	-	1.254	970	2,559
Mestong	266	3.209	-	3.475	6.689	2,084
Kumpeh Ulu	1.809	13.972	-	15.781	42.542	3,044
Sungai Bahar	2.066	14.853	9.524	26.443	34.514	2,323
Bahar Selatan	940	2.728	5.353	9.021	7.473	2,739
Bahar Utara	374	2.361	5.279	8.014	6.225	2,636
Sungai Gelam	1.274	6.579	1.732	9.585	17.769	2,701
Jumlah	16.572	90.044	30.666	136.682	233.551	2,593

Sumber: Dinas Perkebebuman Kabupaten Muaro Jambi 2023

Tabel 3 menjelaskan bahwa Kecamatan Bahar Selatan merupakan Kecamatan yang memiliki luas areal Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM) terluas setelah Kecamatan Sungai Bahar dan Kecamatan Jambi Luar Kota dari keseluruhan luas areal tanaman perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Untuk produksinya yaitu sebesar 7.473 Ton dengan memiliki produktivitas yang masih rendah yaitu sebesar 2,739 Kg/Ha. Banyak perkebunan kelapa sawit yang telah melewati umur ekonomis dan tidak lagi produktif disebabkan oleh keterlambatan petani dalam melakukan peremajaan. Mengingat bahwa kelapa sawit yang sudah melebihi umur ekonomis akan menurunkan produktivitas dan berdampak pada penurunan pendapatan petani, maka

peremajaan kelapa sawit perlu segera dilakukan oleh petani di Kecamatan Bahar Selatan.

Salah satu upaya intensifikasi dalam perkebunan kelapa sawit adalah melalui program peremajaan. Tujuan dari peremajaan tanaman adalah untuk menggantikan tanaman kelapa sawit yang sudah tua dan menurun produktivitasnya, sehingga tidak lagi menguntungkan secara ekonomi. Dalam proses peremajaan, petani memiliki kesempatan untuk mengganti tanaman dengan produktivitas rendah dengan bibit baru yang memiliki potensi yang lebih baik.

Untuk memastikan kelapa sawit tetap berperan secara berkelanjutan, pemerintah telah menetapkan kebijakan mengenai penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit yang diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Sebagai langkah implementasinya, dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2015 yang mengatur penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit. Peraturan ini menjadi dasar bagi penetapan kebijakan teknis dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit yang terencana dan tepat sasaran.

Dukungan pengembangan kelapa sawit ini diberikan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani, koperasi, maupun kelembagaan petani lainnya. Kebijakan tersebut antara lain adalah kegiatan peremajaan (*replanting*) tanaman kelapa sawit dengan kategori tanaman telah berumur 25 tahun, dan tanaman swadaya yang menggunakan bibit tidak unggul meskipun belum memasuki umur 25 tahun, pengembangan sumber daya manusia dan bantuan sarana dan prasarana. Kegiatan tersebut mengintegrasikan seluruh aspek dalam pengembangan

perkebunan kelapa sawit dalam meningkatkan produktivitas kelapa sawit milik perkebunan rakyat.

Kecamatan Bahar Selatan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Sebelumnya pada tahun 2009 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah nomor 28/2009 berisi tentang pemekaran Kecamatan Sungai Bahar yang dibagi menjadi 3 kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Bahar, Kecamatan Bahar Selatan dan Kecamatan Bahar Utara. Menurut kecamatan Bahar Selatan Dalam Angka (2022), Sebagian besar penduduk di Kecamatan Bahar Selatan menggantungkan hidupnya sebagai petani tanaman perkebunan. Dengan luas areal perkebunan yang melebihi 9.000 hektar. Perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bahar Selatan merupakan perkebunan kelapa sawit plasma dimulai sejak tahun tanam 1986/1987 hingga 1992/1993. Adapun data mengenai tahun tanam, luas areal tanaman kelapa sawit menurut desa dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Tahun Tanam, Luas Areal Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), Tanaman Menghasilkan (TM), dan Tanaman Tua (TT) Berdasarkan Desa di Kecamatan Bahar Selatan Tahun 2017

Desa	Tahun Tanam	Luas areal (Ha)			Total (Ha)	Kelompok Tani	KK Asli
		TBM	TM	TT			
Bukit Subur	87/88	-	356	1.100	1.456	22	550
Trijaya	87/88	-	301	500	801	10	250
Mekar Jaya	87/88	-	109	400	509	8	200
Ujung Tanjung	86/87	-	109	620	729	16	310
Tanjung Baru	86/87	-	89	490	579	13	245
Tanjung Mulya	93/94	-	1.122	-	1.122	18	465
Adipura	91/92	-	1.038	-	1.038	21	430
Kencana							
Bukit Jaya	92/93	-	960	-	960	16	400
Tanjung Sari	92/93	-	1.368	-	1.368	23	570
Tanjung Lebar	92/93	-	701	-	701	25	630
Sub Total			6.153	3.110	9.263	172	4.050

Sumber: Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sungai Bahar, 2023

Dari tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa tahun tanam kelapa sawit pertama dilakukan oleh Desa Ujung Tanjung dan Tanjung Baru pada tahun 1986/1987. Jika umur tertua kelapa sawit yang ada di Kecamatan Bahar Selatan ditanam pada tahun 1986, terhitung saat ini tanaman kelapa sawit telah melewati umur ekonomis (>25 tahun). Tanaman yang telah melampaui umur ekonomis mengakibatkan produktivitas yang semakin menurun dan biaya produksi yang semakin meningkat. Mengingat usia kelapa sawit yang sudah memasuki masa tidak produktif maka replanting kelapa sawit perlu segera dilakukan oleh petani, agar tanaman bisa berproduksi secara optimal.

Peremajaan kelapa sawit seharusnya dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan keberlanjutan produksi kelapa sawit, namun hanya sebagian kecil petani yang melaksanakan hal tersebut. Keberlanjutan produksi kelapa sawit oleh petani rakyat dapat tercapai melalui pemberdayaan petani dan lembaga-lembaganya (seperti kelompok tani dan koperasi) dalam proses peremajaan, sekaligus membangun perkebunan kelapa sawit rakyat yang sesuai dengan standar pembangunan berkelanjutan, seperti ISPO. Untuk memperoleh dana peremajaan kelapa sawit, kelompok tani, gapoktan, koperasi, atau lembaga pekebun lainnya perlu mengajukan proposal kepada dinas yang mengelola perkebunan di tingkat Kabupaten/Kota. Adapun data yang diperoleh dari Dinas Perkebunan Muaro Jambi mengenai luas lahan petani yang menerima bantuan dana peremajaan kelapa sawit melalui BPD PKS di Kabupaten Muaro Jambi menurut Kecamatan dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 5. Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Melalui BPDPKS di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017 – 2022

No	Kecamatan	Lembaga pekebun	Desa	Luas (Ha)	Jumlah petani (KK)
1.	Bahar Selatan	KUD Tandan Buah Segar	Ujung Tanjung	167,354	67
		Gapoktan tani maju	Bukit Subur	289,889	138
2.	Sungai Bahar	KUD Sari Makmur	Mekarsari Makmur	589,135	278
		KUD Sri Rezeki	Berkah	179,502	81
		Gapoktan Rambutan	Panca Mulya	404,238	168
3.	Sungai Gelam	KUD Manggar Jaya	Sumber Agung	811,775	341
		Koperasi produsen bakti nusantara lima enam	Panca Bakti	55,476	27
4.	Sekernan	Kelompok tani rimbo siru	Bukit Baling	53,430	20
5.	Bahar Utara	Gapoktan ngudi makmur jaya bangkit	Talang Bukit	116,608	46
		Gapoktan markanding jaya	Markanding	92,469	37
Jumlah				2.759,876	1.203

Sumber: Dinas Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi, 2023

Peremajaan kelapa sawit di Kecamatan Bahar Selatan awal mulai mengajukan Peremajaan melalui BPDPKS pada tahun 2017 dan desa Ujung Tanjung adalah desa pertama yang menerima dana peremajaan kelapa sawit dari BPDPKS, yang juga dikunjungi langsung oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Dalam kunjungan tersebut, dilakukan sosialisasi mengenai proses peremajaan dan alokasi dana dari BPDPKS. Dari 10 desa yang ada di Kecamatan Bahar Selatan, kegiatan peremajaan kelapa sawit dengan pendanaan BPDPKS hanya dilaksanakan di dua desa, yaitu Desa Ujung Tanjung dan Desa Bukit Subur dengan jumlah petani yang melakukan peremajaan sebanyak 205 dari 860 petani yang ada di Desa Ujung Tanjung dan Desa Bukit Subur dengan luas lahan yang

diremajakan sebesar 457,243 ha. Artinya di Kecamatan Bahar Selatan masih rendah dalam melakukan peremajaan sawit rakyat melalui pendanaan BPDPKS.

Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan upaya pengembangan perkebunan dengan mengganti tanaman tua atau yang sudah tidak produktif dengan tanaman baru, baik secara keseluruhan maupun bertahap. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) adalah lembaga yang ditugaskan oleh pemerintah untuk merealisasikan program ini. BPDPKS menyediakan dana peremajaan kelapa sawit rakyat sebesar Rp 30 juta per hektar untuk membantu petani, dengan pertimbangan bahwa tanaman yang diganti sudah mencapai umur ekonomis sekitar 25 tahun dan memiliki produktivitas rendah, yaitu kurang dari 10 ton/ha/tahun, yang menyebabkan pendapatan petani menurun.

Meskipun program peremajaan perkebunan kelapa sawit melalui dana BPDPKS membantu petani dalam melakukan peremajaan, program ini memiliki syarat dan kriteria khusus yang harus dipenuhi oleh petani. Hal ini menyebabkan hanya sedikit proposal petani yang diterima, yang juga dipengaruhi oleh persepsi atau pandangan petani terhadap program peremajaan sawit rakyat melalui BPDPKS. Selain itu, sebagian besar petani cenderung berpikir bahwa peremajaan adalah proses yang sulit dan membutuhkan modal besar untuk pembiayaan. Berdasarkan RAB yang disusun oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, biaya yang dibutuhkan untuk peremajaan kelapa sawit mencapai sekitar Rp 58.000.000 per hektar. Masalah lain yang dihadapi petani adalah bahwa replanting merupakan inovasi baru bagi mereka. Ketakutan petani kehilangan mata pencahariannya selama masa tunggu menjadi tantangan besar, mengingat sistem peremajaan kelapa sawit yang diterapkan mensyaratkan penumbangan serempak (sistem

konvensional). Hal ini memaksa petani untuk beradaptasi dengan aturan teknis tersebut dimana petani belum terbiasa melakukannya, serta mencari solusi untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam proses peremajaan kelapa sawit.

Secara teknis, sistem konvensional memberikan keuntungan karena memungkinkan pengolahan tanah yang lebih intensif dan menyediakan media tanam yang lebih ideal bagi tanaman. Namun, penumbangan tanaman secara serempak akan menghentikan produksi kebun dan berdampak pada perekonomian keluarga petani. Jika dibandingkan dengan sistem peremajaan lainnya, sistem peremajaan kelapa sawit konvensional dianggap cukup membebani petani. Pada akhirnya, hal ini akan membentuk persepsi petani pelaksana terkait peremajaan kelapa sawit yang mereka lakukan. Persepsi petani terhadap peremajaan kelapa sawit melalui BPD PKS menjadi sangat penting karena persepsi tersebut mencerminkan evaluasi petani terhadap pelaksanaan program peremajaan kelapa sawit BPD PKS. Selain itu, persepsi petani terhadap pelaksanaan peremajaan kelapa sawit BPD PKS juga diperlukan untuk memahami sejauh mana petani menginterpretasikan teknik tumbang serempak (konvensional) dari sisi sosial dan ekonomi. Peremajaan yang telah dilakukan memberikan pandangan tersendiri bagi petani, yang dapat memengaruhi pola pikir mereka serta petani lainnya.

Persepsi yang benar terhadap suatu objek sangat diperlukan. Hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan, tinggi rendahnya tingkat persepsi seseorang atau kelompok akan mempengaruhi tingkat peran serta dalam kegiatan. Persepsi yang baik terhadap sebuah program merupakan dasar dukungan dan motivasi positif untuk berperan serta, begitu pula sebaliknya persepsi yang buruk terhadap sebuah program merupakan penghambat bagi sekelompok orang untuk berperan serta

dalam pelaksanaan kegiatan (Susiatik, 1998 dalam Ramadhani, 2011).

Setiap petani tentunya memiliki alasan tersendiri untuk menerima atau menolak suatu inovasi yang diterima sesuai dengan persepsi petani terhadap inovasi tersebut. Perbedaan persepsi antar petani terjadi karena setiap petani memiliki latar belakang karakteristik yang berbeda. Karakteristik tersebut antara lain seperti umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, pengalaman berusahatani dan luas lahan. Menurut Soekartawi (1988) umur berhubungan dengan cepat tidaknya adopsi teknologi oleh petani. Petani yang berusia lebih tua akan memiliki perbedaan sudut pandang dan cara berfikir dengan petani yang berusia lebih muda dalam mengambil keputusan. Pendidikan bagi petani salah satu faktor pelancar pembangunan pertanian. Pola pikir seseorang dalam berpikir dapat mempengaruhi dalam mempersepsikan sesuatu, sehingga tingkat pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi hasil persepsi petani mengenai peremajaan kelapa sawit melalui BPDPKS. Jumlah anggota keluarga berpengaruh pada kegiatan usahatani dan besarnya pendapatan yang diterima. Petani yang memiliki jumlah tanggungan yang besar akan menimbulkan beban ekonomi yang besar pula sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil persepsi petani.

Pengalaman berusahatani mampu mendorong petani untuk melakukan peremajaan kelapa sawit melalui BPDPKS. Petani yang berpengalaman akan lebih cepat mengadopsi inovasi dibandingkan dengan petani yang belum atau kurang berpengalaman, karena pengalaman mempengaruhi kecermatan persepsi (Rakhmat, 2001). Luas lahan yang diusahakan petani akan membentuk persepsi petani mengenai peremajaan kelapa sawit melalui BPDPKS. Semakin luas lahan yang dimiliki maka semakin berbeda pula hasil persepsi petani tentang

peremajaan melalui BPDPKS. Oleh karena itu maka perlu diketahui peran dari masing-masing faktor tersebut dalam membentuk persepsi petani mengenai peremajaan kelapa sawit melalui BPDPKS. Baik atau buruknya persepsi peserta program juga akan berpengaruh terhadap keberlanjutan program itu sendiri dan target yang hendak dicapai oleh program peremajaan sawit rakyat kerangka pendanaan BPDPKS.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **"Hubungan Karakteristik Petani dengan Persepsi Petani Dalam Peremajaan Kelapa Sawit Kerangka Pendanaan BPDPKS di Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi"**.

1.2 Rumusan Masalah

Salah satu upaya intensifikasi dalam perkebunan kelapa sawit adalah program peremajaan. Peremajaan kelapa sawit dilakukan dengan mengganti tanaman tua yang memiliki produktivitas rendah dan sudah tidak menguntungkan secara ekonomi dengan tanaman baru. Kecamatan Bahar Selatan merupakan salah satu kecamatan yang melaksanakan peremajaan kelapa sawit dengan bantuan dana dari BPDPKS sebesar Rp 30.000.000 per hektar. Meskipun demikian, modal yang diberikan oleh pemerintah masih belum mencukupi untuk sepenuhnya melakukan peremajaan kelapa sawit. Berdasarkan RAB dari Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, biaya yang dibutuhkan untuk peremajaan mencapai Rp 58.000.000 per hektar. Dengan demikian, petani masih kekurangan dana dan harus mengeluarkan biaya pribadi untuk perawatan selama proses peremajaan. Kendala lain yang dihadapi petani adalah ketakutan akan kehilangan mata pencaharian selama masa tunggu pertumbuhan kelapa sawit hingga mencapai masa panen.

Pelaksanaan peremajaan sawit rakyat di Kecamatan Bahar Selatan tidak terlepas dari persepsi petani. Persepsi dapat mempengaruhi individu dalam pembuatan keputusan dan persepsi dipengaruhi karakteristik pribadi individu (Robbins, 2008). Keberhasilan pelaksanaan peremajaan sawit rakyat ditandai karena persepsi petani yang positif terhadap pelaksanaan inovasi tersebut. Persepsi sangat ditentukan oleh petani itu sendiri. Sedangkan persepsi petani itu ditentukan oleh karakteristik petani yang meliputi umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, pengalaman berusahatani dan luas lahan.

Dibalik pelaksanaan inovasi program peremajaan kelapa sawit melalui pendanaan BPDPKS diharapkan dapat meningkatkan produksi kelapa sawit di Kecamatan Bahar Selatan yang lebih optimal. Pentingnya untuk mengkaji karakteristik petani yang mempengaruhi persepsi petani terhadap pelaksanaan peremajaan kelapa sawit kerangka pendanaan BPDPKS di Kecamatan Bahar Selatan. Hal ini bertujuan untuk memahami bagaimana karakteristik umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, pengalaman berusahatani dan luas lahan dapat memengaruhi persepsi petani dalam pengambilan keputusan untuk mengadopsi inovasi peremajaan kelapa sawit kerangka pendanaan BPDPKS. Berdasarkan uraian di atas, adapun rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, pengalaman berusahatani dan luas lahan petani di Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi?
2. Bagaimana persepsi petani dalam peremajaan kelapa sawit kerangka pendanaan BPDPKS di Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi?

3. Bagaimana hubungan antara karakteristik umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, pengalaman berusahatani dan luas lahan dengan persepsi petani dalam peremajaan kelapa sawit kerangka pendanaan BPD PKS di Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui karakteristik umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, pengalaman berusahatani dan luas lahan petani di Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi.
2. Mengetahui persepsi petani dalam peremajaan kelapa sawit kerangka pendanaan BPD PKS di Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi.
3. Menganalisis hubungan antara karakteristik umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, pengalaman berusahatani dan luas lahan dengan persepsi petani dalam peremajaan kelapa sawit kerangka pendanaan BPD PKS di Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana pada program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi.
2. Dari Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta kontribusi pemikiran atau informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.